

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Reformasi dalam bidang pengelolaan keuangan negara sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU 17/2003) khususnya dalam sistem penganggaran telah banyak membawa perubahan yang sangat mendasar. Salah satunya adalah penerapan pendekatan penganggaran yang digunakan dalam penyusunannya berupa pendekatan penganggaran terpadu (*Unified Budget*), Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) atau *Medium Term Expenditure Framework (MTEF)*, dan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) atau *Performance Based Budgeting (PBB)*.

Disamping penerapan tiga pendekatan, anggaran belanja negara juga diwajibkan untuk dikelompokkan dalam 3 (tiga) klasifikasi anggaran yaitu klasifikasi fungsi, klasifikasi organisasi, dan klasifikasi ekonomi atau jenis belanja. Penerapan ketiga pendekatan dan klasifikasi tersebut di atas secara bersama dinyatakan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran yaitu Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) dan dokumen pelaksanaan anggaran yaitu Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Banyak hal yang telah dilaksanakan dan dikembangkan dalam rangka reformasi yang dimulai sejak tahun anggaran 2005.

Perubahan dan pengembangan sistem penganggaran tersebut sebagai hasil kajian dan evaluasi penerapan sistem penganggaran selama ini. Namun demikian upaya

yang telah dilakukan tersebut dirasakan belum sepenuhnya sesuai dengan amanat UU 17/2003. Disamping itu perkembangan bidang pengelolaan keuangan negara juga menuntut adanya pengembangan sistem penganggaran sesuai kondisi yang ada. Oleh karena itu sistem penganggaran diupayakan terus disempurnakan. Penyempurnaan dan perubahan ini dilakukan dalam hal penerapan ketiga pendekatan penganggaran dan kejelasan penggunaan klasifikasi anggaran yang digunakan sebagaimana tersebut di atas. Dengan adanya penyempurnaan sistem penganggaran tersebut diharapkan penyusunan anggaran dapat berjalan dengan baik dan lebih berkualitas.

Penganggaran merupakan suatu proses yang cukup rumit pada organisasi sektor publik, termasuk diantaranya Pemerintah Kota. Anggaran tujuan karakteristik yang terdiri dari partisipasi dalam penyusunan anggaran, evaluasi anggaran, umpan balik anggaran, kejelasan tujuan anggaran, serta kesulitan tujuan anggaran terkadang masih dianggap tidak berpengaruh terhadap kinerja pengendalian keuangan. Sedangkan tekanan dari masyarakat agar pemerintah daerah meningkatkan kinerja dan akuntabilitas demi terwujudnya pemerintahan yang baik mengharuskan pemerintah daerah harus membenahi diri untuk merespon perubahan yang diinginkan, termasuk didalamnya satuan kerja perangkat daerah sebagai unit kerja yang mempunyai kegiatan dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran agar dalam pelaksanaannya tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Organisasi sektor publik memerlukan anggaran sebagai pedoman dalam melaksanakan aktivitasnya. Menurut Istiyani (2009) proses penyusunan anggaran merupakan kegiatan yang penting dan melibatkan berbagai pihak baik tingkat atas maupun tingkat bawah yang mempunyai kuasa dalam mempersiapkan dan

mengevaluasi tujuan anggaran, dimana anggaran selalu digunakan sebagai tolak ukur terbaik kinerja manajer. Anggaran diperlukan dalam pengelolaan sumber daya tersebut dengan baik untuk mencapai kinerja yang diharapkan oleh masyarakat dan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat Mardiasmo (2002), bahwa wujud dari penyelenggaraan otonomi daerah adalah sumber daya yang dilakukan secara ekonomis, efisien, efektif, adil dan merata untuk mencapai akuntabilitas publik. Anggaran publik berisi rencana kegiatan yang dipresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter.

Dalam bentuk yang paling sederhana, anggaran publik merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja, dan aktivitas. Anggaran berisi estimasi mengenai apa yang akan dilakukan organisasi di masa yang akan datang. Setiap anggaran memberikan informasi mengenai apa yang hendak dilakukan dalam beberapa periode yang akan datang (Ulum, 2008). Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mencoba mempelajari tentang penganggaran di dinas kementerian pekerjaan umum kota padang dengan melakukan kuliah kerja praktek / magang sebagai pengimplementasian teori yang telah di dapat di perkuliahan dan menuangkan dalam bentuk laporan kerja praktek / laporan magang dengan judul **“PROSES PENYUSUNAN ANGGARAN PADA KEMENTRIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDRAL SUMBER DAYA AIR BALAI WILAYAH SUNGAI SUMATERA V”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang ada di latar belakang masalah, maka perumusan masalahnya adalah “Bagaimana Proses Penyusunan Anggaran Pada Kementerian

Pekerjaan Umum Direktorat jendral Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera V”.

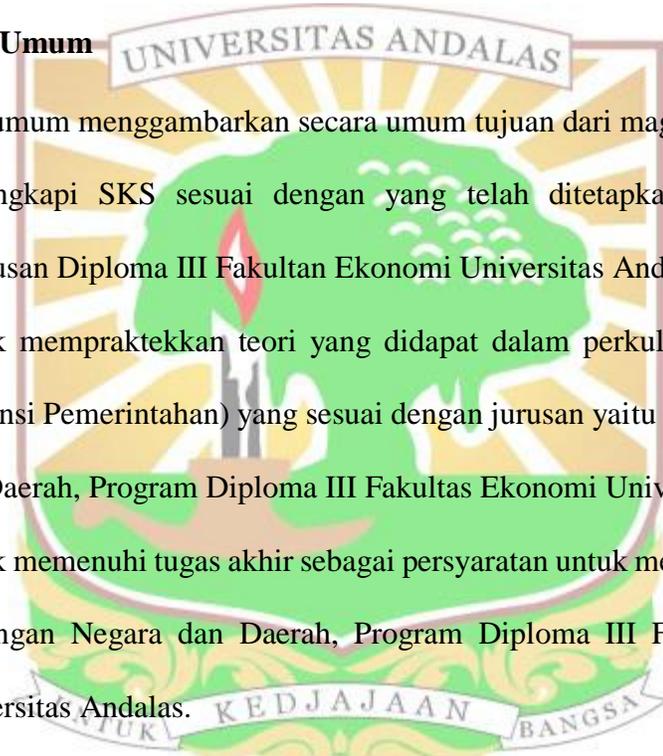
1.3 Tujuan Magang

Magang merupakan mata kuliah yang wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa Program Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Andalas. Adapun tujuan magang terbagi dari tujuan umum dan tujuan khusus yaitu sebagai berikut :

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum menggambarkan secara umum tujuan dari magang yaitu :

- a. Melengkapi SKS sesuai dengan yang telah ditetapkan sebagai syarat kelulusan Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
- b. Untuk mempraktekkan teori yang didapat dalam perkuliahan kelapangan (Instansi Pemerintahan) yang sesuai dengan jurusan yaitu Keuangan Negara dan Daerah, Program Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
- c. Untuk memenuhi tugas akhir sebagai persyaratan untuk menyelesaikan studi Keuangan Negara dan Daerah, Program Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
- d. Meningkatkan wawasan dan pengetahuan terhadap dunia kerja.
- e. Memperkenalkan peserta magang pada dunia kerja sehingga peserta memiliki persepsi, wawasan dan motivasi tinggi terhadap peranannya di masa depan.



- f. Terlatih untuk mensosialisasikan diri dengan rekan kerja dalam lingkungan hidup yang lebih luas dan berhadapan dengan berbagai macam karakter kepribadian serta disiplin ilmu yang berbeda.
- g. Menyaksikan langsung penerapan ilmu yang telah dipelajari dalam praktek di lapangan.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus berkaitan dengan pembahasan dalam penulisan ini yaitu :

- a. Untuk dapat mengetahui dan memahami bagaimana proses penyusunan anggaran pada Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jendral Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera V.

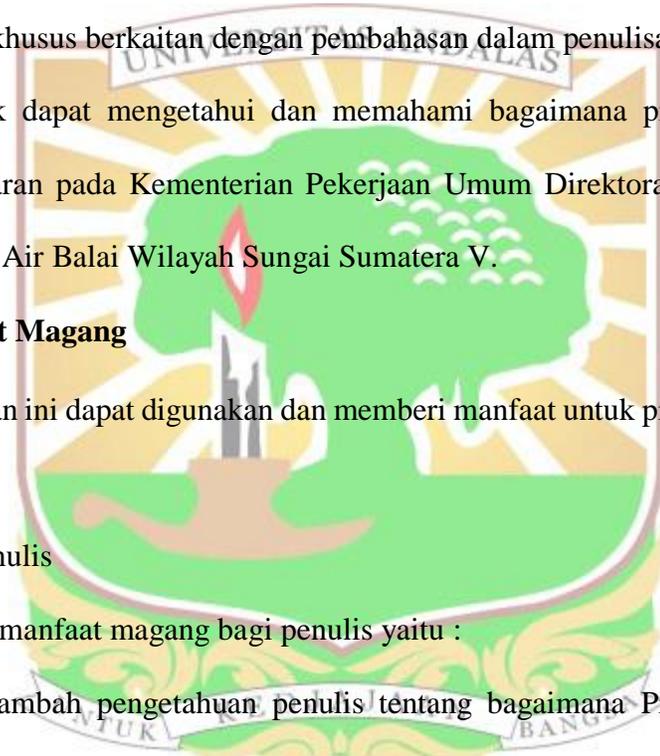
1.4 Manfaat Magang

Penelitian ini dapat digunakan dan memberi manfaat untuk pihak pihak sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Adapun manfaat magang bagi penulis yaitu :

- a. Menambah pengetahuan penulis tentang bagaimana Proses Penyusunan Anggaran pada Kementerian Pekerjaan Umum Balai Wilayah Sungai Sumatera V.
- b. Menambah pengetahuan penulis tentang bagaimana pengendalian penerimaan retribusi pasar pada Dinas Pasar Kota Padang.



2. Bagi Universitas

Terjalannya kerjasama atau hubungan baik antara Universitas dengan dinas/perusahaan tempat magang. Universitas dapat meningkatkan kualitas lulusannya melalui pengalaman kerja magang dan Universitas juga akan dikenal di dunia industri kerja.

3. Bagi Tempat Magang

Dapat memberikan Wacana dan masukan yang dapat dipertimbangkan khususnya dalam Penyusunan Anggaran agar lebih baik pelaksanaannya.

1.5 Tempat, Waktu Magang dan Kegiatan Magang

Penulis berharap selama jangka waktu yang telah ditentukan dapat melakukan kegiatan magang dengan baik dan memuaskan. Penulis juga berharap dapat ditempatkan pada bagian yang sesuai dengan judul laporan magang dan dapat bersosialisasi dengan para pegawai kantor Kementerian Pekerjaan Umum Balai Wilayah Sungai. Dengan pelaksanaan kegiatan magang ini, diharapkan dapat menambah wawasan, ilmu, dan pengalaman penulis.

Magang dilaksanakan pada bulan Juni - Agustus 2015. Selama pelaksanaan magang penulis dalam teorinya berlangsung selama 40 hari kerja yang telah menjadi ketetapan dari pihak akademik. Selama magang penulis berharap dapat melakukan kegiatan yang sama dengan apa yang dilakukan pegawai-pegawai di Kementerian Pekerjaan Umum Balai Wilayah Sungai setiap harinya seperti yang telah menjadi aturan di instansi tersebut.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika laporan magang adalah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Berisikan latar belakang, perumusan masalah, tujuan magang, tempat dan waktu magang, tempat dan waktu magang, dan rencana kegiatan.

BAB II : Landasan Teori

Mengguraikan tentang apa saja teori yang bersangkutan tentang proses penyusunan anggaran.

BAB III : Gambaran Umum Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jendral Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera V.

Menguraikan tentang gambaran umum mengenai Kementerian Pekerjaan Umum yang mencakup sejarah dan perkembangan, ruang lingkup dari bentuk-bentuk kegiatan serta susunan organisasinya.

BAB IV : Pembahasan

Proses penyusunan anggaran pada Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jendral Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera V.

BAB V : Penutup

Berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran yang berdasarkan pada pemahaman teori serta membandingkan dengan apa yang telah diterapkan oleh kantor Kementerian Pekerjaan Umum Balai Wilayah Sungai Sumatera V.

